



The Dynamics of Local Government and Governance Studies: A Bibliometric Analysis of Scopus Publications (2017–2025)”

(*Dinamika Kajian Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola: Analisis Bibliometrik terhadap Publikasi Scopus Periode 2017–2025*)

Itno Husen¹✉ Rahmat Abd Fatah²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, Ternate, Indonesia.

²Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

✉ Corresponding Author¹: Email: ithohusen@gmail.com ² rahmataabdfatah@gmail.com

Info Artikel :	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 12 Okt 2025, Disetujui : 30 Nov 2025, Publikasi On-Line : 30 Nov. 2025			

Abstract

This study aims to analyze the evolving dynamics of local government and governance research through a bibliometric approach based on Scopus data from 2017 to 2025. Employing a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA framework, the study integrates network analysis using *VOSviewer* on 612 selected articles from an initial dataset of 5,744 documents. The findings reveal a significant increase in publication output alongside the emergence of three principal research clusters: participatory governance, model-based empirical approaches, and technology-driven governance. These patterns indicate a paradigm shift from normative frameworks toward evidence-based and digital governance. Furthermore, the analysis uncovers notable geographical disparities in knowledge production, with a concentration of scholarly contributions in specific countries dominating the global discourse. This study contributes theoretically by synthesizing multiple governance paradigms into an integrated analytical framework, while offering practical insights through a comprehensive mapping of research developments. Consequently, it provides a critical foundation for understanding the trajectory of local governance in an increasingly dynamic and complex global context.

Keywords: *Local Government, Governance, Bibliometric Analysis, VOSviewer, Evidence-Based Governance*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kajian pemerintahan daerah dan tata kelola (local government governance) dalam konteks global menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan transformasi politik, ekonomi, dan teknologi. Desentralisasi yang meluas di berbagai negara telah menggeser peran pemerintah daerah dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi aktor strategis dalam pengambilan keputusan publik, penyediaan layanan, serta pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya,

isu-isu seperti transparansi anggaran, partisipasi warga, inovasi kebijakan, serta integrasi teknologi digital menjadi elemen kunci dalam membangun tata kelola yang efektif dan akuntabel. Selain itu, tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan sosial semakin menuntut pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan governance yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based governance). Dalam konteks ini, tata kelola tidak lagi dipahami secara normatif, tetapi sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi multi-aktor dalam jejaring kebijakan yang kompleks.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh konfigurasi institusional, kapasitas birokrasi, serta pola relasi antara negara dan masyarakat. Studi mengenai transparansi anggaran di Kroasia menunjukkan bahwa faktor politik seperti *political stubbornness* berpengaruh signifikan terhadap keterbukaan informasi publik di tingkat lokal (Ott, Mačkić, et al., 2019). Sementara itu, penelitian di Tiongkok mengungkapkan bahwa kompetisi antar pemerintah daerah dan desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap efisiensi tata kelola lingkungan, khususnya dalam pengurangan emisi dan inovasi teknologi hijau (Li et al., 2025; Zeng et al., 2022). Dalam konteks urban governance, kajian tentang sistem pangan perkotaan sirkular menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dan instrumen tata kelola yang inovatif (Polman, 2025). Di negara berkembang, seperti Indonesia, penguatan partisipasi politik masyarakat lokal terbukti mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan legitimasi kebijakan publik (Djuyandi & Siddha, 2025). Selain itu, studi tentang migrasi di Turki menunjukkan bahwa tata kelola lokal menghadapi tekanan kompleks dalam mengelola mobilitas penduduk dan konflik sosial (Demiroğlu, 2021). Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan daerah berkembang dalam spektrum yang luas, mulai dari isu demokrasi lokal hingga efisiensi kebijakan berbasis data.

Namun demikian, meskipun literatur mengenai pemerintahan daerah dan tata kelola berkembang pesat, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup mendasar, terutama dalam memahami struktur intelektual dan tren global secara komprehensif. Sebagian besar studi masih bersifat sektoral dan kontekstual, dengan fokus pada kasus negara tertentu atau isu spesifik, sehingga belum mampu menggambarkan peta pengetahuan secara utuh. Selain itu, terdapat kecenderungan dominasi pendekatan kuantitatif berbasis model dalam beberapa kawasan, seperti Tiongkok, yang menekankan hubungan kausal antar variabel (*effect*, *model*, *panel data*), sementara pendekatan partisipatif dan normatif lebih berkembang di negara lain. Fragmentasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam produksi dan distribusi pengetahuan global. Lebih lanjut, pendekatan bibliometrik yang mampu mengidentifikasi pola keterkaitan antar konsep, kluster tematik, serta evolusi penelitian dari waktu ke waktu masih relatif terbatas dalam kajian ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis sistematis yang mampu mengintegrasikan

berbagai dimensi penelitian tersebut dalam satu kerangka yang utuh.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengadopsi pendekatan bibliometrik berbasis data Scopus yang dikombinasikan dengan analisis visualisasi menggunakan VOSviewer untuk memetakan lanskap penelitian pemerintahan daerah dan tata kelola secara global. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung deskriptif atau berbasis studi kasus, penelitian ini secara eksplisit mengidentifikasi struktur intelektual melalui analisis *co-occurrence* kata kunci, klusterisasi tematik, serta hubungan antar variabel penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri dinamika temporal publikasi ilmiah, sehingga mampu mengungkap pergeseran fokus kajian dari waktu ke waktu, misalnya dari pendekatan normatif menuju pendekatan empiris berbasis model dan data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengayaan literatur, tetapi juga menghadirkan perspektif baru dalam memahami evolusi epistemik kajian governance di tingkat lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami arah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan daerah dan tata kelola secara sistematis dan berbasis data. Tanpa pemetaan yang komprehensif, pengembangan teori dan praktik governance berisiko terfragmentasi dan kurang relevan dengan tantangan global yang terus berubah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi tren publikasi ilmiah terkait pemerintahan daerah dan tata kelola dalam database Scopus periode 2017–2025, (2) memetakan struktur intelektual dan kluster tematik penelitian, serta (3) menganalisis hubungan antar konsep yang membentuk lanskap kajian ini. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: bagaimana perkembangan tren penelitian governance daerah secara global? apa saja kluster utama yang membentuk struktur pengetahuan? dan bagaimana keterkaitan antar variabel dalam penelitian tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode bibliometrik dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* berbasis PRISMA, serta analisis jaringan menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Data diperoleh dari database Scopus dengan kriteria pencarian *TITLE-ABS-KEY* “pemerintahan daerah” dan “tata kelola” pada periode 2017–2025, dengan jenis dokumen artikel ilmiah (*article*). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang objektif, terukur, dan dapat direplikasi dalam

memetakan dinamika kajian governance secara global.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometric analysis berbasis Systematic Literature Review (SLR) sebagai respons atas urgensi untuk memetakan perkembangan kajian pemerintahan daerah dan tata kelola secara komprehensif, terukur, dan berbasis data global. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi tren penelitian, struktur intelektual, serta keterkaitan antar konsep secara objektif, sehingga relevan dalam menjawab fragmentasi literatur dan dinamika perkembangan studi governance. Penelitian ini mengadopsi kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Paranata, 2025) untuk memastikan proses seleksi literatur dilakukan secara transparan, sistematis, dan dapat direplikasi. PRISMA memungkinkan peneliti menyaring dokumen secara bertahap melalui proses identifikasi, screening, eligibility, dan inklusi, sehingga kualitas dan relevansi data yang dianalisis dapat terjamin.

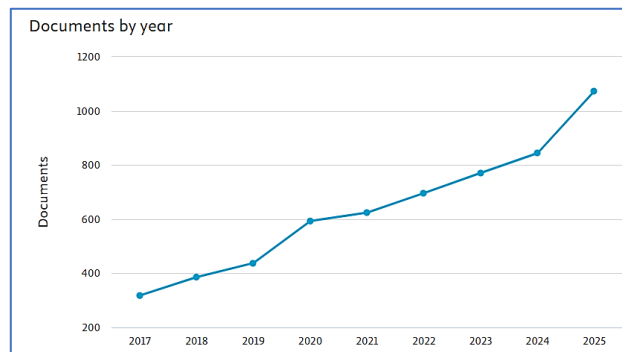
Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi dokumen melalui database Scopus, dilanjutkan dengan proses screening berdasarkan relevansi judul dan abstrak, serta penghapusan dokumen duplikat. Pada tahap ini, dari total awal 5.744 dokumen, sebanyak 3.982 dokumen dieliminasi sehingga tersisa 1.762 dokumen. Selanjutnya, tahap eligibility dilakukan dengan menilai kesesuaian substansi dan kualitas ilmiah, di mana 1.021 dokumen dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria analisis. Tahap akhir adalah inklusi, yaitu penetapan dokumen yang digunakan dalam analisis, sehingga diperoleh 612 dokumen sebagai unit analisis final.

Sumber data penelitian berasal dari database Scopus dengan subjek artikel ilmiah internasional. Proses pencarian menggunakan query TITLE-ABS-KEY ("Pemerintahan Daerah" AND "Tata Kelola") dengan rentang tahun publikasi 2017–2025 serta pembatasan pada tipe dokumen artikel (article), sehingga menghasilkan dataset yang relevan dan mutakhir dalam kajian governance daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui ekstraksi metadata (judul, abstrak, kata kunci, penulis, dan tahun publikasi) dari Scopus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan co-occurrence kata kunci, mengidentifikasi kluster tematik, serta

menganalisis hubungan antar konsep dalam struktur penelitian. Analisis ini memungkinkan visualisasi jaringan pengetahuan secara sistematis dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kajian pemerintahan daerah dan tata kelola dalam literatur global.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika publikasi terkait pemerintahan daerah dan tata kelola mengalami peningkatan signifikan sepanjang periode 2017–2025 (lihat Gambar 1). Lonjakan publikasi yang semakin tajam pasca-2020 tidak dapat dipahami semata sebagai pertumbuhan kuantitatif, melainkan sebagai refleksi perubahan epistemik dalam studi governance. Dalam perspektif teori multi-level governance, peningkatan ini mencerminkan reposisi pemerintah daerah sebagai aktor strategis dalam merespons kompleksitas global, termasuk krisis kesehatan, digitalisasi, dan tekanan keberlanjutan (Marks, 2020). Dengan kata lain, governance daerah tidak lagi bersifat administratif, tetapi telah bergeser menjadi arena koordinasi lintas level dan lintas aktor yang menuntut kapasitas adaptif dan inovatif.

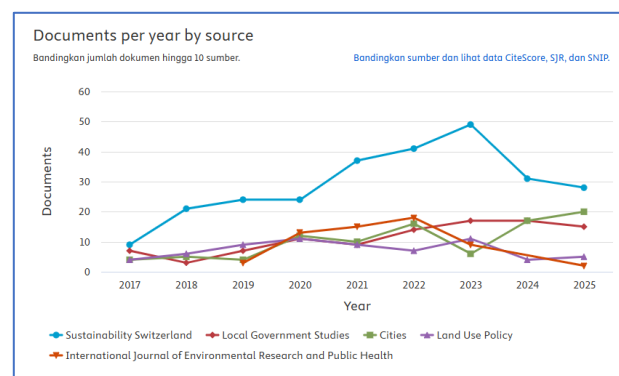


Gambar 1. Dokumen berdasarkan tahun (Sumber: scopus)

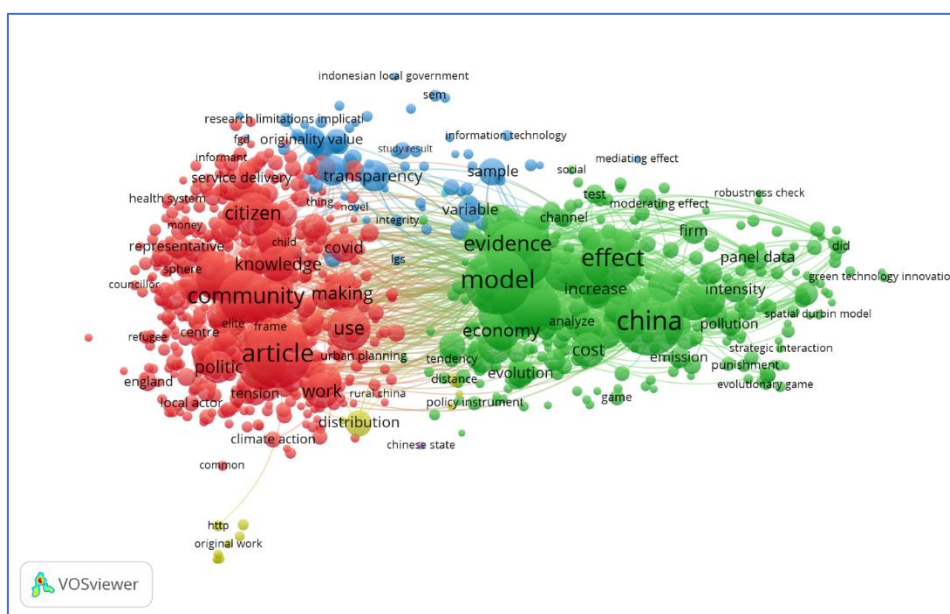
Sementara distribusi publikasi berdasarkan sumber jurnal memperlihatkan dominasi jurnal yang berorientasi pada keberlanjutan dan kebijakan publik (lihat Gambar 2). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran normatif dalam *governance*, dari sekadar efisiensi administratif menuju *sustainability governance*. Dalam kerangka teori *new public governance*, orientasi ini menekankan pentingnya kolaborasi, integrasi kebijakan, dan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam tata kelola modern. Dengan demikian, literatur governance daerah semakin terhubung dengan isu global seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis struktur intelektual melalui *VOSviewer* mengidentifikasi tiga kluster utama yang mencerminkan perbedaan paradigma dalam studi governance (lihat Gambar 3). Kluster pertama (merah) berorientasi pada community governance yang menekankan partisipasi warga, produksi pengetahuan kolektif, dan pelayanan publik berbasis komunitas. Dalam perspektif teori participatory governance, keterlibatan warga bukan sekadar instrumen demokrasi, tetapi merupakan mekanisme produksi legitimasi kebijakan. Studi (Dube et al., 2020; Hardiman et al., 2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal memperkuat kualitas demokrasi substantif dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, kluster ini

mencerminkan dimensi normatif governance yang berakar pada nilai inklusivitas dan keadilan sosial.



Gambar 2. Distribusi Publikasi per Tahun berdasarkan Sumber (Sumber: Scopus)



Gambar 3. Network Visualization (Sumber: VOSviewer)

Kluster kedua (hijau) memperlihatkan dominasi pendekatan empiris berbasis model yang berakar pada tradisi positivistik. Kata kunci seperti model, effect, dan panel data menunjukkan bahwa governance dipahami sebagai sistem yang dapat diukur dan dianalisis secara kuantitatif. Dalam kerangka *evidence-based policy* (Guglielmin et al., 2023), pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan publik harus didasarkan pada bukti empiris yang teruji. Studi (Canare, 2021; Zhu & Huang, 2025) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan kompetisi antar daerah memiliki dampak signifikan terhadap inovasi teknologi dan efisiensi lingkungan. Namun demikian, dominasi pendekatan ini juga mengindikasikan potensi reduksionisme, di mana kompleksitas sosial governance direduksi menjadi variabel kuantitatif semata.

Kluster ketiga (biru) menghubungkan dimensi transparansi dan teknologi informasi, yang mencerminkan transformasi governance menuju digital governance. Dalam perspektif teori good governance, transparansi merupakan prasyarat utama akuntabilitas dan kepercayaan publik. (Ott, Bronić, et al., 2019) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi fiskal berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Integrasi teknologi informasi dalam governance tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka dan partisipatif.

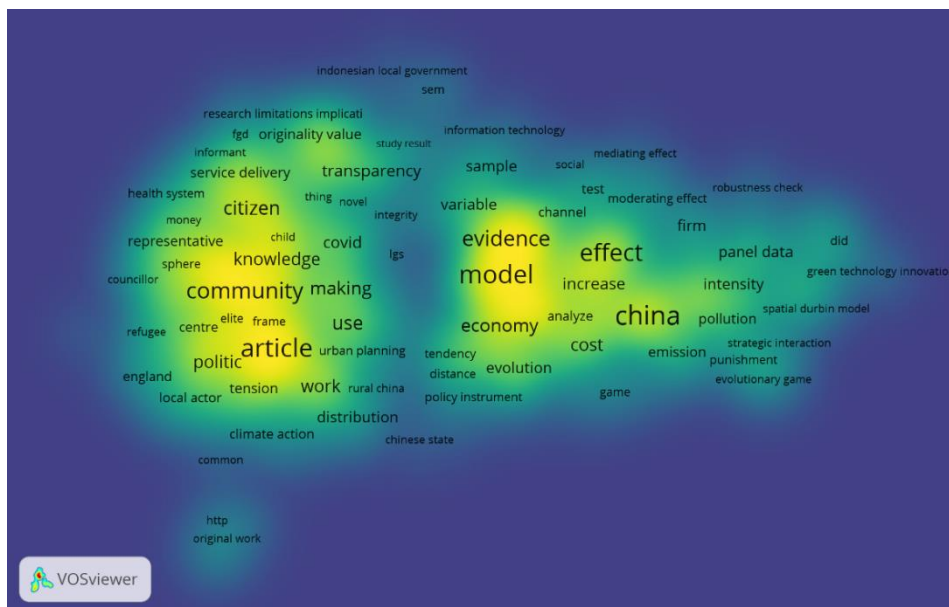
Analisis *density visualization* menunjukkan bahwa pusat gravitasi penelitian berada pada kata kunci seperti model, community, dan china (lihat Gambar 4). Temuan ini mengindikasikan adanya dualisme epistemologis dalam studi governance,

yaitu antara pendekatan normatif-partisipatif dan pendekatan empiris-kuantitatif. Dalam perspektif teoritik, dualisme ini mencerminkan ketegangan antara paradigma konstruktivis dan positivistik dalam ilmu sosial.

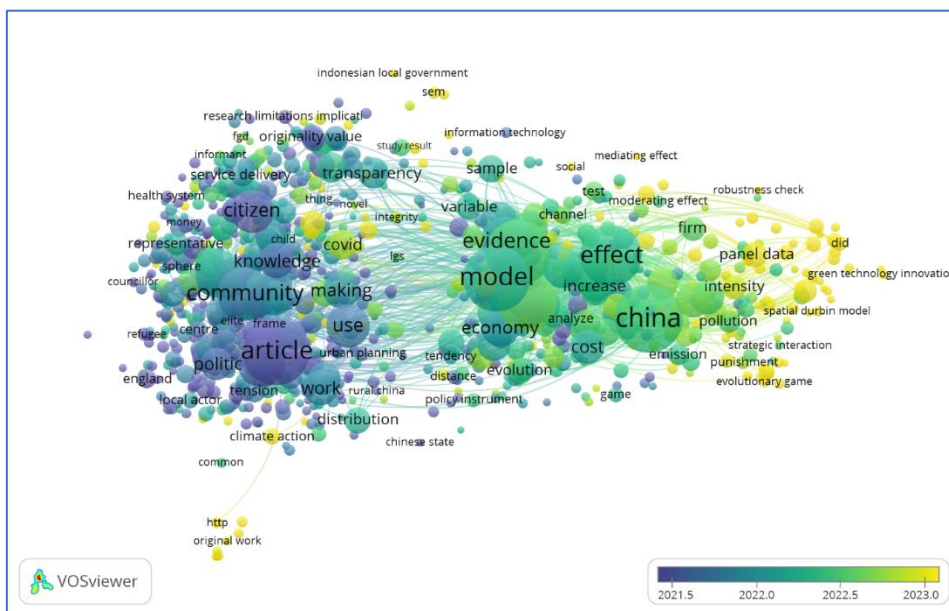
Sementara itu, *overlay visualization* mengungkap bahwa tren penelitian terbaru mengarah pada integrasi teknologi, inovasi

kebijakan, dan analisis berbasis data (lihat Gambar 5).

. Hal ini menunjukkan bahwa *governance* daerah sedang mengalami transformasi menuju smart governance, di mana teknologi digital dan analisis data menjadi instrumen utama dalam pengambilan keputusan publik.



Gambar 4. Density Visualization (Sumber: VOSviewer)



Gambar 5. Overlay Visualization (Sumber: VOSviewer)

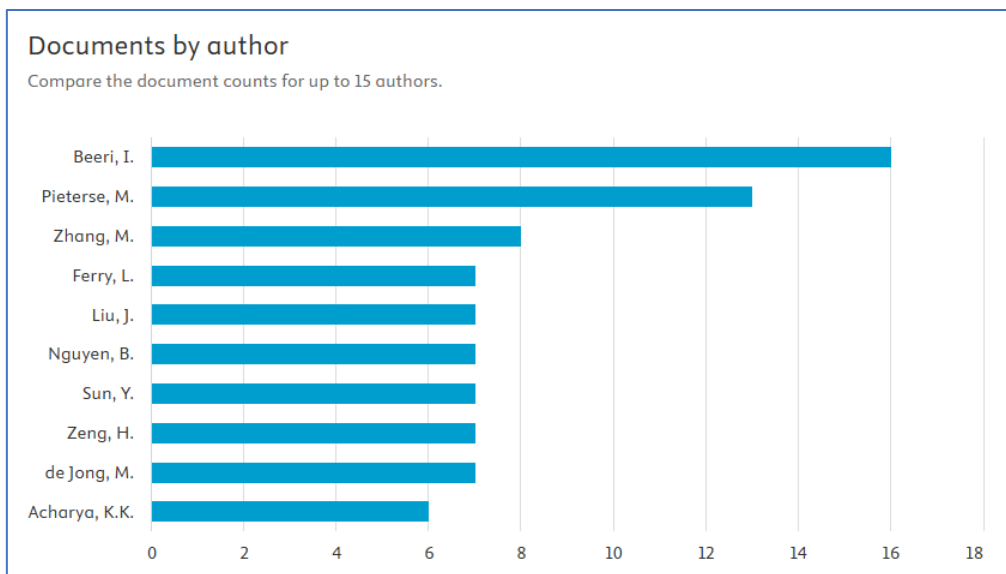
Dari perspektif aktor akademik, dominasi penulis dan institusi dari Tiongkok menunjukkan adanya pergeseran pusat produksi pengetahuan global (lihat Gambar 6). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *knowledge production* yang menekankan bahwa produksi ilmu

pengetahuan dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan investasi riset suatu negara.

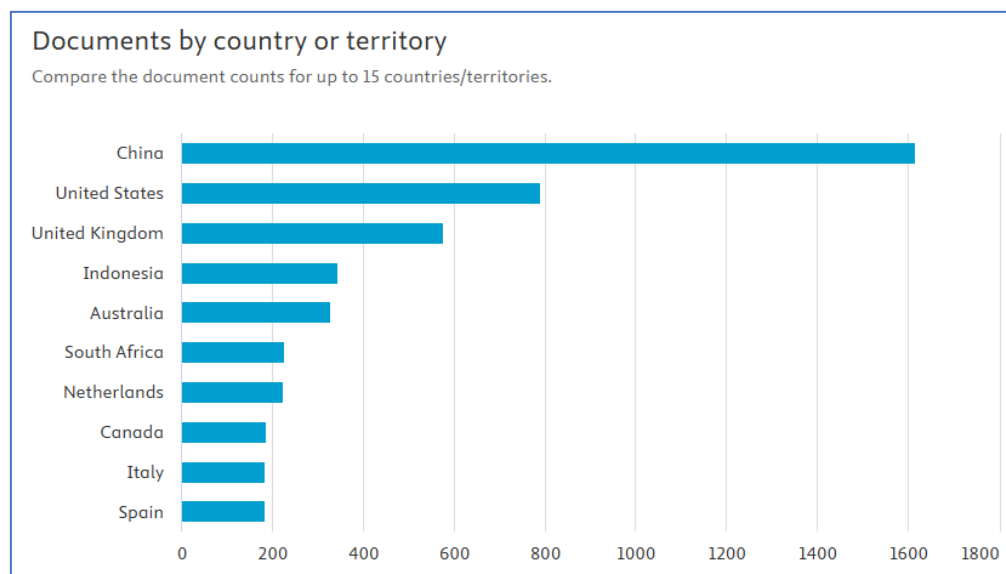
Distribusi geografis yang didominasi oleh Tiongkok juga mengindikasikan bahwa pendekatan empiris berbasis model lebih berkembang di kawasan tersebut (lihat Gambar 7). Hal ini memperkuat argumen bahwa terdapat

ketimpangan epistemik dalam studi governance global, di mana pendekatan tertentu lebih dominan di wilayah tertentu. Sementara dari sisi disiplin ilmu, dominasi *social sciences* menunjukkan bahwa *governance* tetap berakar

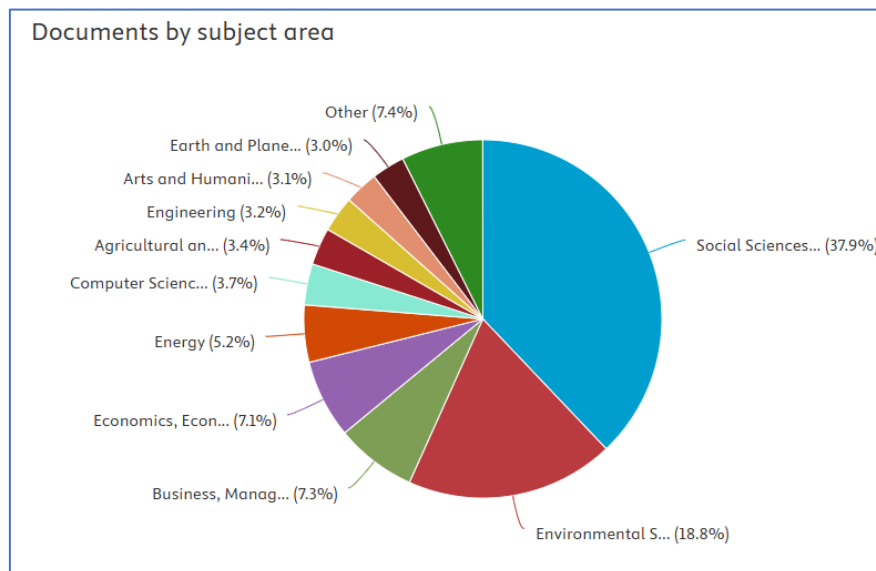
pada kajian sosial, meskipun semakin terintegrasi dengan ilmu lingkungan dan ekonomi (*lihat Gambar 8*).



Gambar 6. Dokumen berdasarkan penulis (Sumber: Scopus)



Gambar 7. Dokumen berdasarkan Negara (Sumber: scopus)



Gambar 8. Dokumen berdasarkan subjek area (Sumber: scopus)

Secara keseluruhan, hasil studi ini menunjukkan bahwa kajian pemerintahan daerah dan tata kelola mengalami transformasi dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih integratif, berbasis data, dan multidisipliner. Tiga paradigma utama partisipatif, empiris, dan digital tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk struktur pengetahuan governance modern. Dengan demikian, kontribusi utama studi ini terletak pada kemampuannya mengungkap dinamika epistemik dalam studi governance, sekaligus menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah dalam konteks global yang terus berubah.

IV. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian pemerintahan daerah dan tata kelola mengalami transformasi signifikan dalam periode 2017–2025, ditandai dengan peningkatan publikasi dan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan empiris dan berbasis teknologi. Analisis bibliometrik mengungkap tiga klaster utama, yaitu governance partisipatif berbasis komunitas, pendekatan empiris berbasis model, serta tata kelola berbasis transparansi dan teknologi digital. Temuan ini menegaskan bahwa governance modern tidak lagi bersifat administratif, tetapi berkembang menjadi sistem yang kompleks, adaptif, dan berbasis bukti. Selain itu, terdapat ketimpangan geografis dalam produksi pengetahuan, dengan dominasi negara tertentu yang mencerminkan perbedaan

pendekatan metodologis. Secara teoritik, hasil ini memperkuat integrasi antara paradigma *participatory governance*, *evidence-based policy*, dan *digital governance* dalam membentuk struktur pengetahuan governance global. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan peta intelektual yang komprehensif serta menjadi dasar bagi pengembangan teori dan praktik tata kelola pemerintahan daerah yang lebih integratif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Acosta-Caipa, K., Espinoza-Molina, J., Vera-Barrios, B., & Pino-Vargas, E. (2025). Multi-level Climate Governance for Urban Heat Island Mitigation in Tacna, Atacama Desert, Southern Peru: An Integrated Approach Based on the SDGs. *Inzynieria Mineralna*, 2(2). <https://doi.org/10.29227/IM-2025-02-02-122>
- Aquino, A. C. B. (2024). Accountability from the periphery to the centre of the local government research agenda. *Local Government Studies*, 50(6), 1129–1142. <https://doi.org/10.1080/03003930.2024.2415683>
- Bar, S., & Beeri, I. (2025). Who gets the credit? Claiming political credit and avoiding blame in regional Inter-Municipal Cooperation. *Public Policy and Administration*. <https://doi.org/10.1177/09520767251345878>
- Canare, T. (2021). Decentralization and welfare: theory and an empirical analysis using

- Philippine data. *Public Sector Economics*, 45(1), 93–123. <https://doi.org/10.3326/pse.45.1.3>
- Chen, Y., Yeh, A. G. O., & Zhang, Y. (2017). Political tournament and regional cooperation in China: a game theory approach. *Annals of Regional Science*, 58(3), 597–622. <https://doi.org/10.1007/s00168-017-0809-6>
- Demiroğlu, E. T. (2021). “Compulsory” migration governance at local level: The case of İstanbul. *Lex Localis*, 19(4), 967–990. [https://doi.org/10.4335/19.3.967-990\(2021\)](https://doi.org/10.4335/19.3.967-990(2021))
- Djuyandi, Y., & Siddha, A. (2025). STRENGTHENING DEMOCRACY AND COMMUNITY POLITICAL ENGAGEMENT IN SUMEDANG, INDONESIA. *Scientific Culture*, 11(3.2), 574–583. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11322544>
- Dube, C., Mnguni, L., & Tschudin, A. (2020). Peacebuilding through Public Participation Mechanisms in Local Government: The Case Study of Mbizana Local Municipality, South Africa. *Journal of Illicit Economies and Development*, 2(2), 242–255. <https://doi.org/10.31389/jied.68>
- Gu, Z., Tian, C., Zheng, Z., & Zhang, S. (2022). Favorable Fiscal Self-Sufficiency Enables Local Governments to Better Improve the Environmental Governance—Evidence from China’s Lower-Pollution Areas. *Sustainability (Switzerland)*, 14(23). <https://doi.org/10.3390/su142316202>
- Guglielmin, M., Shankardass, K., Bayoumi, A., O’campo, P., Kokkinen, L., & Muntaner, C. (2023). Tools for local health in all policies implementation: evidence from an explanatory case study of Kuopio, Finland. *Scandinavian Journal of Public Health*, 51(8), 1196–1204. <https://doi.org/10.1177/14034948221090076>
- Guo, S., Wen, L., Wu, Y., Yue, X., & Fan, G. (2020). Fiscal decentralization and local environmental pollution in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 1–17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228661>
- Hardiman, R., Pedersen, A. B., Jensen, A., Dai, K. G., & Petersen, C. (2024). Public participation and NGO activity in nature-based solutions in urban areas of China. *Nature-Based Solutions*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2024.100183>
- Hickmann, T. (2021). Locating cities and their governments in multi-level sustainability governance. *Politics and Governance*, 9(1), 211–220. <https://doi.org/10.17645/pag.v9i1.3616>
- Jaiyen, T., Aimim-Tham, S., Nurmandi, A., & Mutiarin, D. (2020). How do ethics and transparency practices work in Thailand’s local governments? *International Journal of Public Sector Performance Management*, 6(3). <https://www.scopus.com/pages/publications/85091526486?origin=resultslist>
- Khatri, D. B., Nightingale, A. J., Ojha, H., Maskey, G., & Lama ‘Tsumpa,’ P. N. (2022). Multi-scale politics in climate change: the mismatch of authority and capability in federalizing Nepal. *Climate Policy*, 22(8), 1084–1096. <https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2090891>
- Li, G., Zhou, P., & Wu, R. (2025). Local government competition, fiscal decentralization, and environmental governance efficiency. *Finance Research Letters*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108537>
- Liu, L., & Zhang, W. (2022). Vertical fiscal imbalance and government spending on science and technology in China. *Economic Change and Restructuring*, 55(3), 1953–1971. <https://doi.org/10.1007/s10644-021-09373-1>
- Marks, A. B. (2020). (Carbon) farming our way out of climate change. *Denver Law Review*, 97(3), 497–556. <https://www.scopus.com/pages/publications/85091813588?origin=resultslist>
- Meza, O. D., Grin, E. J., Fernandes, A. S., & Abrucio, F. L. (2019). Intermunicipal Cooperation in Metropolitan Regions in Brazil and Mexico: Does Federalism Matter? *Urban Affairs Review*, 55(3), 887–922. <https://doi.org/10.1177/1078087418816433>
- Onofrei, M., Oprea, F., Iațu, C., Cojocariu, L., & Anton, S. G. (2022). Fiscal Decentralization, Good Governance and Regional Development—Empirical Evidence in the European Context. *Sustainability (Switzerland)*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/su14127093>
- Ott, K., Bronić, M., Stanić, B., Klun, M., & Benčina, J. (2019). Determinants of online local budget transparency in Croatia and Slovenia. *Central European Public Administration Review*, 17(2), 167–187.

- <https://doi.org/10.17573/cepar.2019.2.08>
Ott, K., Mačkić, V., & Bronić, M. (2019). Political stubbornness and online local budget transparency in Croatia. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics*, 37(2), 553–585. <https://doi.org/10.18045/zbefri.2019.2.553>
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 1–34. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Petrachin, A., & Solano, G. (2025). The Political Drivers of Horizontal Governance Relations in Small Localities: Evidence from a Cross-Country and Cross-Locality Study Across Seven Western European Countries. *Urban Affairs Review*, 61(4), 992–1029. <https://doi.org/10.1177/10780874241270050>
- Polat, R. K., & Lowndes, V. (2022). How Does Multi-Level Governance Create Capacity to Address Refugee Needs, and with What Limitations? An Analysis of Municipal Responses to Syrian Refugees in Istanbul. *Journal of Refugee Studies*, 35(1), 51–73. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab101>
- Polman, D. (2025). Policymaking for circular urban food systems: A systematic literature review of policy instruments and governance arrangements. *Regional Science Policy and Practice*, 17(11). <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100250>
- Yu, J., Xian, Q., Cheng, S., & Chen, J. (2024). Horizontal ecological compensation policy and water pollution governance: Evidence from cross-border cooperation in China. *Environmental Impact Assessment Review*, 105. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107367>
- Zeng, H., Li, X., Zhou, Q., & Wang, L. (2022). Local government environmental regulatory pressures and corporate environmental strategies: Evidence from natural resource accountability audits in China. *Business Strategy and the Environment*, 31(7), 3060–3082. <https://doi.org/10.1002/bse.3064>
- Zhu, Y., & Huang, K. (2025). Fiscal pressure, tax enforcement and stock price crash risk: empirical evidence from China. *Applied Economics*. <https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2589447>



Copyright© 2025. Itno Husen



Google Scholar



GARUDA
GARA RUKUKAN DIGITAL



ijirelawan
JURNAL INDONESIA



Crossref
doi